

Evaluasi Program Konversi Minyak Tanah Ke LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) Di Kelurahan Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang

Oleh :
Pamaria Hendri S, Margaretha S, Ida Hayu D

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Kerosene to LPG program in Kelurahan Tembalang is a program of the central government. This program is an effort by the government to address the heightened oil prices and depleting the availability. World oil prices are rising, affecting the size of the state budget for it, the government convert kerosene to LPG. In addition, the abundant presence of LPG in Indonesia and has not been used optimally. Kerosene to LPG is intended for the middle class and small kerosene users.

The purpose of this study was to evaluate and analyze the conversion program from kerosene to LPG in Kelurahan Tembalang, so it can be seen that the impact occurred, success factors, barriers, and recommendations of the program further. The evaluation program is based on indicators by William N Dunn which include: equity, adequacy, and accuracy and indicators according to a LAN that includes: input, output, outcome, benefits and impacts. In this study, researchers used a snowball sampling technique. Data collection method used is in-depth interview techniques, observation and study documentation.

This study suggests that the conversion program from kerosene to LPG in Kelurahan Tembalang has both positive and negative. The positive effect is caused by the public convenience and saving of expenditure, while the negative effects are elderly people who are afraid to use LPG 3 kg. Kerosene to LPG in Kelurahan Tembalang running less successful because most of the middle above the target program and the people are reluctant to use LPG. Inhibiting factor is the lack of monitoring of the government, the state of society with poor conditions, 3 kg LPG price in excess of HET.

Key word : *evaluation program, impact, kerosene conversion.*

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ketersediaan minyak dan gas bumi yang tidak sebanding dengan kebutuhan

masyarakat membuat harga minyak menjadi tinggi. Sementara itu kondisi ekonomi masyarakat Indonesia rata-rata berpendapatan rendah. Harga minyak

dunia yang semakin meningkat sangat mempengaruhi harga jual minyak di Indonesia. Hal ini berdampak pada besarnya APBN dan devisa negara yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Keterbatasan APBN dan devisa negara membuat pemerintah melakukan beberapa kali revisi APBN agar kegiatan ekonomi dan pemerintahan tetap stabil.

Pemerintah menaksirkan program konversi minyak tanah ke LPG ini akan menghemat APBN hingga 17,5 trilyun rupiah. Hal ini dipertegas dengan Surat Wakil Presiden RI No.20/ WP/ 9/2006 tanggal 1 September 2009 Perihal : Konversi Pemakaian Minyak Tanah Ke LPG dimana Peluncuran pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG 3 kg oleh Wapres tanggal 08 Mei 2007 Jam 14.00 WIB di Kampung Makasar, Jakarta Timur.

Program konversi minyak tanah ke LPG mempunyai tujuan antara lain : (1) diversifikasi energi dalam hal pengurangan ketergantungan penggunaan minyak tanah; (2) efisiensi energi dengan memanfaatkan tingginya kalor LPG daripada minyak tanah; (3) penyediaan bahan bakar yang praktis, higienis, dan efisien untuk pemenuhan kebutuhan kegiatan rumah tangga maupun usaha makro/mikro; (4) adanya pengurangan subsidi BBM yang pada tahun 2012 mencapai kerosene

Program konversi minyak tanah ke LPG terbagi atas : sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, survai, validasi data kepada ketua RT, pendistribusian paket LPG 3 kg kepada masyarakat dengan kategori tertentu. Jika masyarakat telah terbiasa menggunakan LPG maka minyak tanah ditarik dari pasaran.

Kementrian Negara Koperasi Dan UKM bertanggungjawab atas pendistribusian kompor gas beserta

aksesorisnya ke masyarakat. Masyarakat sasaran konversi memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Rumah Tangga, merupakan keluarga berpenghasilan kurang dari Rp 1.500.000,- perbulan pengguna minyak tanah dan tidak mempunyai kompor gas,

2. Usaha Mikro Pengguna Minyak Tanah
Kota Semarang merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang menjadi target konversi minyak tanah ke LPG. Kota Semarang merupakan kota pertama di Jawa Tengah dalam mengimplementasikan “ Program Konversi Minyak Tanah ke LPG ”. Pemerintah Kota Semarang hanya akan mengeluarkan anggaran sebesar Rp 2,601 Trilyun /thn untuk subsidi LPG, jika masyarakat beralih ke LPG. Program konversi minyak tanah ke LPG dibagi dalam beberapa tahap yaitu :

Kecamatan Tembalang merupakan kecamatan dengan sasaran konversi terbanyak di Kota Semarang yaitu sebesar 26.885 sasaran yang terdiri dari 24.316 kepala keluarga dan 2.569 UKM. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk menjadikan Tembalang sebagai lokus penelitian.

Pemerintah telah merumuskan kebijakan publik sebaik mungkin untuk memecahkan masalah yang ada. Kebijakan publik harus diawasi agar tujuan dapat tercapai. Salah satu mekanisme pengawasan adalah evaluasi kebijakan publik. Evaluasi kebijakan publik digunakan untuk mengetahui seberapa efektif kebijakan publik yang nantinya dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Evaluasi digunakan untuk mengetahui kesenjangan antara “harapan dan kenyataan”.

Program konversi minyak tanah ke LPG di Kelurahan Tembalang ini

diduga ada beberapa penyimpangan atau permasalahan. Program konversi minyak tanah ke LPG ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan kurang dari Rp. 1.500.000/bulan. Kompor gas beserta aksesorisnya diberikan secara gratis kepada masyarakat tersebut.

Program konversi minyak tanah ke LPG di kelurahan Tembalang terbagi dalam 3 tahap. LPG 3 kg diberikan kepada: (1) masyarakat menengah kebawah pengguna minyak tanah; (2) warga pemilik UKM pengguna minyak tanah; (3) ada pihak swasta yang ingin membagikan LPG 3 kg kepada masyarakat di Kelurahan Tembalang karena masyarakat miskin di kelurahan Tembalang ini telah menerima paket konversi. Masyarakat pengguna LPG 12 kg merasa iri kepada sasaran program konversi minyak tanah ke LPG, maka LPG 3 kg ini dibagikan kepada masyarakat tersebut. Hal tersebut melanggar apa yang telah ditetapkan pemerintah. Selain pada ketidaktepatan sasaran, harga LPG 3 kg di Kelurahan Tembalang rata-rata mencapai Rp. 13.500,00.

Pemerintah sebagai implementor program konversi minyak tanah ke LPG” harus mampu mengimplementasikan program nasional tersebut dengan baik. Fakta di lapangan menunjukkan adanya permasalahan, sehingga memerlukan pemecahan masalah untuk hasil (*output*) sesuai dengan tujuan yang dirumuskan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian apakah program konversi minyak tanah ke LPG telah berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pemerintah dengan judul **“Evaluasi Program Konversi Minyak Tanah ke LPG di Kelurahan**

Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang”.

B. TUJUAN

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengevaluasi dampak program konversi minyak tanah ke LPG.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis keberhasilan dan faktor penghambat konversi minyak tanah ke LPG.

C. TEORI

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Carl J. Frederick mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan tertentu (Nugroho, 2009: 83)

James Anderson (seperti dikutip Nawawi, 2009: 16) mengungkapkan proses kebijakan publik sebagai berikut : (1) Formulasi masalah ; (2) Apa masalahnya; (3) Formulasi kebijakan; (4) Bagaimana mengembangkan pilihan; (5) Penentuan kebijakan; (6) Implementasi; (7) Evaluasi.

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu mekanisme pengawasan kebijakan publik. Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja pelaksanaan kebijakan, tujuan dan kinerja kebijakan, berbagai instrumen kebijakan yang dikembangkan, respon masyarakat dan *stakeholder*, mengetahui dampak dan perubahan yang ditimbulkan, serta untuk mengetahui apakah kebijakan

tersebut sebaiknya dilanjutkan atau diperbaiki.

Untuk melakukan evaluasi kebijakan atau program setidaknya ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan yaitu :

- 1) Mengidentifikasi tujuan kebijakan atau program yang akan dievaluasi.
- 2) Penjabaran tujuan program kedalam indikator pencapaian tujuan.
- 3) Pengukuran indikator pencapaian tujuan kebijakan/program.
- 4) Berdasarkan indikator tersebut dicari datanya dilapangan.
- 5) Pengolahan hasil kemudian dikomparasi dengan kriteria pencapaian tujuan.

Evaluasi sering digunakan untuk menunjukkan tahapan siklus pengelolaan yang meliputi: (a) Evaluasi pada tahap perencanaan (*ex-ante*); (b) Evaluasi pada tahap pelaksanaan (*On going*); (c) Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan (*ex- post*).

Subarsono (seperti dikutip Suwitri, 2008: 90) mengungkapkan evaluasi kebijakan publik mempunyai beberapa tujuan yaitu : (1) Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan; (2) Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan; (3) Mengukur tingkat *outcome* suatu kebijakan; (4) Mengukur dampak suatu kebijakan; (5) Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan; (6) Sebagai bahan *input* untuk kebijakan selanjutnya. Evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakan dengan metode analisis kebijakan lainnya yaitu: (a) fokus nilai; (b) Interpendensi fakta nilai; (c) Orientasi masa kini dan masa lampau; (d) Dualitas nilai. Evaluasi di dalam analisis kebijakan publik maka Dunn memaparkan beberapa pendekatan dalam evaluasi kebijakan yaitu evaluasi

semu, evaluasi formal, evaluasi teori keputusan.

Untuk menilai keberhasilan kebijakan perlu dipertimbangkan beberapa indikator, karena indikator tunggal akan membahayakan. Willian N Dunn mengembangkan indicator menjadi enam yaitu : (a) Efektivitas; (b) efisiensi; (c) Kecukupan; (d) Pemerataan; (e) Responsivitas; (f) Ketepatan. Lembaga Administrasi Negara mengembangkan model *input* dan *output performance* yang lebih menekankan pada pencapaian hasil pelaksanaan kebijakan. Model ini membagi indikator kinerja kebijakan menjadi enam yaitu : (1) *Input*; (2) *process*; (3) *output*; (4) *outcome*; (5) *benefit*; (6) *impact*.

Program konversi minyak tanah ke LPG merupakan program pengalihan subsidi penggunaan minyak tanah ke LPG 3 kg melalui pembagian paket LPG 3 kg beserta isi, kompor, regulator dan selang secara gratis kepada masyarakat sesuai kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Program ini bertujuan untuk mengatisipasi semakin menipisnya cadangan minyak bumi di Indonesia dan semakin melambungnya harga minyak dunia. Selain itu program ini juga bertujuan untuk mengurangi beban subsidi BBM yang terlalu besar, khususnya subsidi minyak tanah. Secara teknis, konversi minyak tanah ke LPG terbukti lebih mudah digunakan, hemat, aman dan ramah lingkungan. Program konversi ini memiliki target sasaran rumah tangga dan usaha mikro.

D. METODE

1. Desain penelitian

Di dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dengan demikian data yang terkumpul berbentuk kata-kata,

gambar, bukan angka-angka, angka sebagai penunjang. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala tertentu.

2. Situs Penelitian (Lokus Penelitian)

Lokus dalam penelitian ini adalah Kelurahan Tembalang yang merupakan daerah konversi dengan jumlah sasaran terbesar di Kota Semarang.

3. Subyek Penelitian (Informan)

Di dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah *snow-ball sampling*. Adapun informan yang dipilih yaitu :

1. Lurah Tembalang, Ketua RT
2. Kasi Kesejahteraan Sosial
3. Masyarakat dan UKM penerima LPG
4. Warga pemilik pangkalan LPG 3 kg.

4. Jenis data

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan data berupa : catatan lapangan, kata-kata tertulis, tindakan-tindakan, dan peristiwa-peristiwa.

5. Sumber data

Sumber data dimaksudkan semua informasi baik yang berupa benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa/gejala. Sumber ada 2 jenis :

- a. Data primer : hasil wawancara dan observasi.
- b. Data sekunder : buku-buku, media, arsip, dan data penunjang lainnya.

6. Teknik pengumpulan data

Di dalam melakukan penelitian peneliti mengumpulkan data dengan metode :

1. Wawancara, merupakan metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan.
2. Observasi, merupakan pengamatan pencatatan secara sistematis terhadap

unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala penelitian.

3. Studi dokumentasi. Pengumpulan data bersifat sekunder yang diperoleh dari surat kabar, internet, buku, arsip dan perpustakaan.

7. Analisis dan Interpretasi data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif Huberman dan Milles yang terdiri dari tiga hal utama yaitu: (a) Reduksi data; (b) Penyajian data; (c) Penarikan kesimpulan (Idrus, 2009 :146-147).

8. Teknis pengujian keabsahan data

Cara yang dapat dilakukan untuk teknik pengujian keabsahan data dengan teknik triangulasi yaitu : (1) Melakukan wawancara mendalam kepada informan ; (2) Melakukan uji silang antar informasi; (3) Mengkonfirmasi hasil.

9. Metode Evaluasi

Tahap-tahap evaluasi program dengan pendekatan kualitatif secara garis besar adalah (Royse, David et al, 2006):

1. Menentukan tujuan evaluasi, jangka waktu evaluasi, dan faktor pendukung lain seperti aksesibilitas ke dalam program
2. Menentukan unit analisis yang merujuk kepada individu yang terlibat dalam program (panitia, peserta, penyandang dana, pengguna output program, unsur pendukung program).
3. Menentukan sample, jenis data yang akan dikumpulkan, cara menganalisis data, dan cara menyimpulkan.

PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Program konversi minyak tanah ke LPG merupakan salah satu upaya pemerintah

untuk mengurangi beban subsidi pemerintah terhadap minyak tanah yang harganya semakin mahal dan jumlahnya yang semakin terbatas. Ketersediaan gas alam di Indonesia yang melimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal menjadi salah satu alasan pemerintah untuk mengalihkan minyak tanah ke LPG. Selain itu, dengan menggunakan gas dirasa lebih aman, praktis dan efisien dibanding dengan minyak tanah. Harga gas dalam bentuk LPG lebih murah daripada minyak tanah pada saat ini, sehingga penggunaan LPG akan meringankan beban APBN untuk subsidi gas sendiri.

Program konversi minyak tanah ke LPG di Kelurahan Tembalang dilaksanakan antara tahun 2007 – 2008. Sosialisasi program konversi minyak tanah ke LPG di Kelurahan Tembalang terbagi dalam beberapa tahap dari pemerintah kecamatan ke kelurahan kemudian ke RT dan RW baru ke perkumpulan masyarakat tiap-tiap RT. Alur sosialisasi program konversi minyak tanah ke LPG di Kelurahan Tembalang telah berlangsung dengan baik. Sosialisasi bersifat *top-down* yaitu dimulai dari pemerintah tingkat atas menuju ke masyarakat secara berjenjang.

Sensus merupakan tahap pendataan masyarakat menengah kebawah yang layak untuk menjadi sasaran konversi minyak tanah. Sensus ini dilakukan oleh pihak eksternal. Di Kelurahan Tembalang sensus dilakukan oleh konsultan atas persetujuan dari kelurahan dan RT. Pihak RT memberikan data masyarakat miskin yang layak untuk menjadi sasaran program konversi minyak tanah ke LPG kepada konsultan, kemudian konsultan mengunjungi masyarakat tersebut.

Pendistribusian paket kompor gas di Kelurahan Tembalang terbagi dalam ketiga tahap tersebut yaitu tahap pertama warga miskin, tahap kedua koreksian dan tahap ke ketiga adalah untuk warung-warung. Untuk pendistribusian kompor gas sendiri masyarakat mengambil ke ketua RT masing-masing dari Kelurahan dibagi ke RT kemudian ke masyarakat namun ada juga yang langsung mengambil di Kelurahan. Pelatihan singkat sangat diperlukan kepada masyarakat penerima karena sasaran dari program ini adalah masyarakat menengah ke bawah yang tidak memakai kompor gas melainkan kompor minyak

Evaluasi Program Konversi Minyak Tanah ke LPG

Di dalam mengevaluasi program konversi minyak tanah ke LPG di Kelurahan Tembalang, peneliti menguraikan hasil penelitian berupa data wawancara menjadi beberapa konsep evaluasi program sebagai berikut :

1. Input

Program dapat terlaksana dengan baik, diperlukan pemanfaatan sumber daya yang meliputi antara lain anggaran, tenaga kerja, peralatan. Program konversi minyak tanah ke LPG di Kelurahan tidak memberikan anggaran dan tidak ada anggaran dari APBD Kota Semarang. Di dalam pelaksanaan program ini Kelurahan Tembalang melibatkan seluruh pegawai Kelurahan, pengurus RT dan tokoh masyarakat. Seperangkat kompor gas diberikan kepada kelompok sasaran program yang telah didata langsung oleh konsultan. Seperangkat kompor gas ini meliputi kompor gas, regulator dan tabung LPG 3 kg.

2. Output

Output dari program konversi minyak tanah ke LPG meliputi kelembagaan yang

berhasil dibentuk dan data penerima sasaran sebagai hasil sensus konsultan. Pelaksanaan program konversi minyak tanah ke LPG di Kelurahan Tembalang tidak membentuk kepengurusan struktural. Program ini dilaksanakan oleh para staf kelurahan dibantu pengurus RT. Data sasaran penerima LPG merupakan data hasil dari sensus atau survai yang dilakukan oleh konsultan atas pertimbangan RT. Data penerima sasaran didapat dari arsip kelurahan yaitu sejumlah 219 KK penerima LPG.

3.Outcome

Hasil program konversi minyak tanah ke LPG salah satunya adalah masyarakat penerima LPG 3 kg yang tepat sasaran yaitu masyarakat menengah ke bawah dan UKM. Berdasarkan pengamatan peneliti melihat bahwa masyarakat yang tidak berhak menerima paket kompor gas mendapat paket konversi tersebut dengan alasan untuk memenuhi target. Sasaran program konversi minyak tanah ke LPG adalah masyarakat, untuk itu dukungan dan partisipasi masyarakat merupakan salah satu hasil yang dicapai.

4.Benefit

Setiap program atau kebijakan pemerintah mempunyai manfaat yang dapat dilihat pada akhir pelaksanaan program. Kelurahan Tembalang belum pernah mengalami kelangkaan dalam memperoleh bahan bakar LPG kecuali pada saat lebaran karena semua masyarakat membutuhkan pada waktu yang bersamaan dan dalam jumlah yang besar. Selain itu pemakaian LPG lebih hemat daripada minyak tanah, pemakaian dalam jumlah besar, penggunaan LPG sebanding dengan apa yang dikeluarkan.

5.Impact

Dampak program konversi minyak tanah ke LPG ini dapat terlihat setelah program ini berlangsung. Pemakain LPG lebih

nyaman daripada minyak tanah. Sampai saat ini masyarakat masih tetap menggunakan LPG 3 kg dan belum ada keluhan atau kesalahan pemakaian yang begitu berarti. Program konversi minyak tanah ke LPG ini memang masih terdapat kekurangan terutama dalam hal kondisi tabung LPG 3 kg yang semakin tidak layak dan membahayakan. Pembatasan jumlah pangkalan LPG 3 kg perlu diperhatikan terutama indomaret yang menjual LPG jauh lebih mahal dari harga di pangkalan atau warung-warung.

6. Kecukupan

Indikator kecukupan dalam penelitian ini melihat dari dua aspek yaitu kepuasan dari pelaku kebijakan dan fasilitas yang diperoleh. Para pelaku kebijakan program konversi minyak tanah ke LPG pada umumnya merasa kurang puas terhadap kebijakan ini. Fasilitas merupakan salah satu unsur dari indikator kepuasan . Fasilitas dari program konversi minyak tanah ke LPG ini sangat membantu proses berjalannya kebijakan program konversi LPG dengan baik.

7. Pemerataan

Indikator pemerataan dalam program konversi minyak tanah ke LPG ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu anggaran dan biaya. Pemerintah Kelurahan Tembalang tidak mengeluarkan biaya untuk pelaksanaan program konversi minyak tanah ke LPG. Pada dasarnya program ini sangat bermanfaat untuk masyarakat karena mereka dilatih untuk tidak tergantung pada minyak tanah yang keberadaannya semakin menipis.

8. Ketepatan

Di dalam indikator ketepatan program konversi minyak tanah ke LPG dapat dilihat dari sasaran program konversi itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sasarannya program konversi

minyak tanah ke LPG diperoleh dari seleksi yang dilakukan oleh konsultan atas persetujuan RT dan piha kelurahan. Dengan jumlah rata-rata 34 KK/ RT.

B. ANALISIS

Program konversi minyak tanah ke LPG ini bukan berasal dari sebuah ide atau gagasan dari masyarakat namun program ini atas gagasan dari pemerintah pusat sebagai inovasi untuk mengatasi krisis minyak dunia di Indonesia. Program ini bersifat *top-down* namun disambut baik oleh berbagai kalangan.

Sosialisasi berjenjang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah hingga sampai ke masyarakat sebagai salah satu upaya untuk mengenalkan maksud dan tujuan dari program konversi minyak tanah ke LPG ke aparat pelaksana dan sasaran program.

Konsultan mendata masyarakat menengah kebawah dan pemilik usaha mikro yang sesuai kriteria sasaran program konversi minyak tanah ke LPG. Sensus dilakukan setelah sosialisasi program dari pihak kelurahan. Setelah data terkumpul maka data hasil sensus setiap RT direkap untuk dijadikan data kelurahan hingga PERTAMINA sebagai acuan jumlah paket kompor gas yang harus dibagikan ke kelompok sasaran.

Pihak pendistribusi mengecek dengan data yang ada dan mereka yang telah mengambil mendapat tanda bahwa mereka telah mengambil. Jadi dapat dikatakan bahwa pendistribusian paket konversi di Kelurahan Tembalang berjalan dengan lancar.

Pelatihan singkat di Kelurahan Tembalang belum maksimal karena masih ada sebagian masyarakat yang mengalami kesalahan pemasangan. Mereka dibantu oleh masyarakat yang sudah terbiasa memakai kompor gas.

Pendekatan Konsep Evaluasi

Penilaian terhadap program konversi minyak tanah ke LPG dilakukan secara menyeluruh dari awal perencanaan sampai dengan dampak yang dihasilkan oleh program ini.

1. Input / Masukan

Konsep masukan yang dinilai dari program ini meliputi anggaran, tenaga kerja dan seperangkat kompor. Unsur anggaran dalam konsep *input* sangat penting dan berpotensi meningkatkan kinerja para pelaksana. Program konversi minyak tanah ke LPG melibatkan Lurah selaku penanggungjawab dari Kelurahan, Ketua RT, konsultan independen dan PERTAMINA.

Seperangkat kompor gas atau paket konversi tersebut meliputi kompor gas satu tungku, tabung LPG 3 kg dan regulator. Masyarakat menyatakan keadaan paket konversi tersebut baik dan layak pakai, namun aparat pelaksana paket konversi tersebut tidak layak untuk dibagikan ke sasaran program. Perbedaan persepsi ini dikarenakan kelompok sasaran adalah masyarakat miskin yang belum terbiasa menggunakan kompor gas.

3. Output / Keluaran

Kelembagaan merupakan hal yang terpenting dalam pelaksanaan program konversi minyak tanah ke LPG. Kelembagaan merupakan pelaksana program konversi minyak tanah ke LPG. Kelembagaan atau pengurus akan memudahkan pembagian kerja. Di dalam pelaksanaan program konversi minyak tanah ke LPG di Kelurahan Tembalang tidak ada kepengurusan tersendiri. Pihak yang menjadi pengurus adalah staf karena sudah terbiasa untuk melaksanakan berbagai program dari pemerintah.

Regulasi yang telah dibuat pemerintah ini seolah diabaikan oleh para penjual LPG. Hal ini terjadi karena

meraka tidak mengetahui adanya aturan ini atau permainan harga oleh pihak penjual. Melihat fenomena tersebut, aspek kelembagaan dalam *output* dapat dikatakan kurang baik karena kurangnya monitoring harga LPG di masyarakat.

Data sasaran penerima LPG di Kelurahan Tembalang merupakan data yang valid karena survai yang dilakukan konsultan berdasarkan arsip data masyarakat menengah kebawah dan masyarakat pemilik usaha mikro setiap RT. Konsultan mensurvey secara *door to door* untuk menguji kebenaran data setiap RT tersebut. Peneliti menyimpulkan, data sasaran penerima LPG dalam konsep *output* dapat dikatakan baik.

3. Outcome / Hasil

Penilaian terhadap konsep *outcome* mengacu pada hasil yang diperoleh dari program konversi minyak tanah ke LPG.

Masyarakat penerima LPG pada konsep *outcome* dalam program konversi minyak tanah ke LPG di Kelurahan Tembalang dapat dikatakan kurang baik atau tidak tepat sasaran karena ada masyarakat yang seharusnya tidak layak tetap memperoleh paket LPG 3 kg.

Masyarakat Tembalang senantiasa mendukung program pemerintah yang bersifat gratis. Masyarakat terbuka pada saat pendataan oleh konsultan. Keadaan yang seperti ini sangat diperlukan untuk keberhasilan program. Partisipasi dalam kategori *outcome* dapat dikatakan sangat baik.

4. Benefit / Manfaat

Penilaian pendekatan konsep *benefit* yang ada terdapat dalam program ini berkenaan dengan manfaat.

Program pemerintah harus memberikan kemudahan bagi masyarakat. Manfaat dari program konversi minyak tanah ke LPG ini antara lain adalah bahan

bakar LPG yang mudah didapat di setiap atau pangkalan terdekat. Selain mudah, ketersediaan LPG masih melimpah.

Masyarakat penerima LPG di Kelurahan Tembalang merasa lebih hemat menggunakan LPG daripada minyak tanah dan merasa lebih nyaman dan higienis. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemerintah dalam penghematan pengeluaran dapat dikatakan berhasil

5. Impact / Dampak

Dampak dari suatu program dapat dirasakan setelah program tersebut selesai dilaksanakan. Masyarakat mulai nyaman dan terbiasa menggunakan LPG. Penggunaan LPG juga lebih praktis dan cepat. Mereka tidak mau apabila ditawarkan untuk beralih ke minyak tanah lagi. Kategori kenyamanan dalam *impact* dari program konversi minyak tanah ke LPG bisa dikatakan baik.

Pelaksanaan program konversi minyak tanah ke LPG tidak mengalami hambatan namun perlu sedikit koreksi dalam hal kelayakan tabung LPG 3 kg. Kondisi tabung LPG yang sudah tidak layak perlu di tata ulang. Pembatasan jumlah penjual LPG sangat perlu diawasi.

6. Kecukupan

Kriteria kecukupan menurut William N.Dunn adalah seberapa jauh hasil program ini dapat memecahkan masalah yang ada. Kriteria kecukupan di dalam program konversi minyak tanah ke LPG dapat dilihat dari fasilitas dan kepuasan.

Dengan melihat analisis pada pendekatan konsep evaluasi, dapat disimpulkan bahwa program konversi minyak tanah ke LPG ini kurang memenuhi kriteria kecukupan. Hal ini dikarenakan fasilitas yang diberikan dari PERTAMINA kepada aparat pelaksana

maupun kepada masyarakat kurang baik. Media keluhan yang seharusnya ada juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Paket konversi yang rusak dari masyarakat penerima tidak segera diganti oleh pemerintah.

7. Pemerataan

Kriteria pemerataan menurut William N. Dunn adalah apakah biaya dan manfaat dapat didistribusikan secara merata pada kelompok yang berbeda. Di dalam pelaksanaan program, fasilitas telah ditanggung oleh pemerintah pusat. Pihak kelurahan hanya sebagai penyalur paket konversi dari pemerintah pusat kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Manfaat dari program konversi minyak tanah ke LPG dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat kelompok sasaran. Namun ada beberapa masyarakat yang seharusnya bukan kelompok sasaran juga merasakan manfaat dari program konversi minyak tanah ke LPG. Manfaat yang dapat dirasakan dari program ini adalah penggunaan LPG lebih aman daripada minyak tanah, lebih bersih dan cepat daripada penggunaan minyak tanah.

8. Ketepatan

Kriteria ketepatan menurut William N. Dunn adalah apakah hasil yang dicapai bermanfaat. Program konversi minyak tanah ke LPG belum sepenuhnya memenuhi kriteria ketepatan. Hal ini terjadi, karena kesalahan penetapan kelompok sasaran program yang mana paket konversi minyak tanah ke LPG dibagikan secara merata kepada masyarakat. Masyarakat yang seharusnya tidak berhak tetap mendapat paket konversi. Jadi manfaat yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat menengah ke bawah pengguna LPG juga dinikmati oleh masyarakat yang sebenarnya sudah menggunakan LPG. Hal ini

menunjukkan, bahwa program konversi minyak tanah ke LPG tepat sasaran, namun terdapat sedikit penyimpangan, yaitu adanya masyarakat mampu yang mendapatkan paket konversi.

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Program konversi minyak tanah ke LPG di Kelurahan Tembalang memiliki dampak yaitu :

❖ Dampak positif :

- a) Kenyamanan masyarakat
- b) Penghematan pengeluaran

❖ Dampak negatif :

Informasi terhadap peledakan LPG 3 kg di berbagai media membuat masyarakat yang berusia lanjut takut untuk menggunakan LPG.

2. Program konversi minyak tanah ke LPG ini dapat dikatakan kurang berhasil dimana target dan sasaran telah tercapai namun masih ada penyimpangan. Faktor yang menunjang keberhasilan tersebut antara lain adalah:

- a) Dukungan dan partisipasi masyarakat
- b) Pelaksana program yang mengimplementasikan program konversi minyak tanah sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh pemerintah.

Faktor-faktor yang menghambat keberhasilan program sebagai berikut:

- a) Kurangnya monitoring dari pemerintah sehingga ada beberapa warga bukan sasaran program tetapi mendapat paket kompor gas
- b) Keadaan masyarakat ekonomi kurang mampu : mereka terpaksa beralih menggunakan kayu bakar.

- c) Harga LPG 3 kg yang mencapai Rp.15.000,- / tabung (melebihi HET).

B. REKOMENDASI

1. Pemerintah sebaiknya melakukan monitoring terutama dalam melihat dampak negatif yang timbul di masyarakat. Dampak negatif tersebut antara lain adalah adanya masyarakat yang beralih ke kayu bakar karena paket konversi yang mereka terima telah rusak. Pemerintah perlu menyediakan media konsultasi dan keluhan masyarakat dalam hal program konversi minyak tanah ke LPG di Kelurahan Tembalang.
2. Program konversi minyak tanah ke LPG perlu dipertahankan keberlanjutannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Affifudin. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Dunn, William N. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Presss
- Hadi, Samsul. 2006. *Pengantar Metode Riset Evaluasi*, Yogyakarta : PT. Kurnia Kalam Semesta
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy Analisis Strategi Advokasi Teori Dan Praktek*. Surabaya : PNM
- Mulyadi. 2005. *Akuntansi Biaya*, edisi ke-6. Yogyakarta: STIE YKPN
- Nugroho, Riant . 2009. *Public Policy* . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Puspo, Budi. 2006. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sukoco, Badri. (2007). *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*. Jakarta: Erlangga
- Suwitri, Sri. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* Bayumedia Publising
- Surat Wakil Presiden RI No.20/ WP/ 9/2006 tanggal 1 September 2009
- Sumber Internet :**
(<http://www.pertamina.com/konversi/faq.php> -) diakses 06 oktober 2011
- Kuliah umum Alvin Lie,2009 “Program Konversi Minyak Tanah Ke LPG”
- Kartyca, Peranan Konversi Minyak Tanah Ke Gas Elpiji, <http://kartyca87.wordpress.com/> diakses pada 17 oktober 2011 pukul 19:15
- Sandy, Widy. <http://widytaurus.wordpress.com/> diakses pada 17 February 2012 pukul 09.12
- Sumber dari Skripsi :**
Era, Riski. (2012). *Evaluasi Program Program Klaster Bandeng Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi di Kota Semarang*, Semarang. *Skripsi*. Universitas Diponegoro
- Sumber dari Jurnal :**
Setyaningsih, Retno. “ Studi Pengkajian tentang Kebijakan pada Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, I (Oktober,2007), hal:62-72